

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan telaah literatur yang telah disajikan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Artinya, semakin tinggi PAD di suatu daerah, semakin rendah Kemiskinan di daerah tersebut.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi DAU yang lebih berfokus pada belanja rutin, belanja pegawai, dan kesehatan, sehingga kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Artinya, semakin tinggi DAK yang diterima suatu daerah, semakin rendah Kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa DAK yang dialokasikan untuk program-program seperti Keluarga Harapan, Kartu Jateng Sejahtera, BOS daerah, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi DBH yang tidak merata, di mana daerah penghasil menerima DBH yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Perbedaan alokasi ini menyebabkan kemampuan daerah dalam

melaksanakan pembangunan menjadi tidak merata, sehingga menghambat proses pengentasan kemiskinan.

5. Belanja Modal tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal belum optimal dalam menekan Kemiskinan. Belanja modal lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi yang memajukan perekonomian, namun tidak selalu ditujukan khusus untuk membantu masyarakat miskin.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi kebijakan alokasi anggaran dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah eks keresidenan Pekalongan, yaitu :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD di suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam menghasilkan PAD. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong sektor-sektor unggulan di daerah meliputi pengembangan industri kreatif dan pariwisata lokal, yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal. Di Kabupaten dan Kota di wilayah eks Keresidenan Pekalongan, seperti Kota Pekalongan, Batang, dan Pemalang, sektor batik, agroindustri, dan perikanan dapat menjadi fokus utama. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah daerah perlu menciptakan

iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan prosedur perizinan, memberikan insentif pajak kepada investor, serta meningkatkan infrastruktur penunjang seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi. Misalnya, pembangunan kawasan industri dan pelabuhan di Batang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor manufaktur dan logistik. Selain itu, peningkatan investasi juga dapat dicapai melalui kerja sama dengan sektor swasta dan penyelenggaraan event promosi investasi yang menarik minat investor dari dalam dan luar negeri. Pajak yang dapat diperluas untuk meningkatkan PAD mencakup pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, serta pajak parkir. Di Kota Pekalongan, yang terkenal dengan industri batiknya, penerapan pajak pada pusat-pusat penjualan batik dan produk kerajinan tangan dapat menjadi sumber pendapatan baru. Sementara itu, di Pemalang dan Batang, pengembangan sektor pariwisata dapat disertai dengan optimalisasi pajak hotel dan restoran untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Dengan demikian, perluasan basis pajak ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan tingkat kemiskinan.

2. DAK terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi DAK dengan fokus pada program-program yang langsung menasar masyarakat miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program-program DAK meliputi pelibatan aktif pemerintah daerah dalam perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah

dapat melakukan pemetaan daerah miskin dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga program yang diusulkan benar-benar tepat sasaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan DAK, pemerintah daerah perlu mengadopsi sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat. Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses monitoring dan evaluasi program. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi berbasis web atau *mobile*, juga dapat digunakan untuk melacak perkembangan dan penyerapan anggaran DAK secara langsung, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai penggunaan dana dan kemajuan program. Dengan demikian, optimalisasi DAK melalui peningkatan peran serta pemerintah daerah dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Jika memang alokasi DAU dan DBH belum optimal, perlu dilakukan penyesuaian agar alokasi tersebut lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi penyesuaian alokasi anggaran dengan fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan masyarakat miskin di wilayahnya dan mengalokasikan dana DAU dan DBH untuk program-program yang relevan, usai pandemi covid-19 seperti

peningkatan akses pendidikan, perbaikan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi.

4. Belanja modal perlu dialokasikan secara lebih optimal dengan fokus pada kebijakan dan pembangunan yang langsung menysasar masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat perencanaan dan pengawasan terhadap belanja modal, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan belanja modal. Contoh program belanja modal yang langsung menysasar masyarakat miskin antara lain pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan kecil, dan saluran irigasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat miskin di pedesaan. Pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin juga merupakan investasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Program pembangunan pasar tradisional yang memadai juga dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan tempat usaha yang lebih baik bagi pedagang kecil. Selain itu, pembangunan pusat pelatihan keterampilan kerja dan sentra industri kecil dan menengah (IKM) di daerah miskin dapat memberikan peluang kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mereka dapat lebih produktif dan memiliki penghasilan yang lebih baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian ini, terdapat sejumlah hal dan faktor yang menjadi keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian. Dari lima variabel independen

yang digunakan dalam analisis, ditemukan hanya PAD dan DAK yang berpengaruh negatif signifikan sesuai dengan hipotesis penelitian. Variabel Belanja Modal, DAU, dan DBH tidak memiliki pengaruh negatif signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakakuratan data yang digunakan, di mana terdapat data yang belum diaudit (*unaudited*) yang diperoleh dari situs BPS.go.id. Selain itu, terdapat faktor *extraordinary* yaitu pandemi Covid-19 selama periode 2020 - 2021 yang menyebabkan lonjakan Kemiskinan. Untuk penelitian di masa mendatang, disarankan agar peneliti menggunakan data yang telah diaudit untuk memastikan akurasi dan reliabilitas hasil penelitian. Selain itu, peneliti dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain seperti Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah Penduduk penting karena peningkatan jumlah penduduk tanpa peningkatan kesempatan kerja dapat meningkatkan kemiskinan. IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dengan memasukkan variabel-variabel ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Peneliti juga sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode analisis yang lebih kompleks yang dapat menangani variabilitas data yang tinggi akibat faktor *extraordinary*. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat lebih menggambarkan kondisi sebenarnya dan memberikan kontribusi yang lebih akurat dalam memahami dinamika variabel-variabel yang diteliti.